

PASTIKAN HAK PILIH WARGA NEGARA

Bawaslu DIY Gulirkan Patroli Pengawasan

YOGYA (KR) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY menggulirkan patroli pengawasan kawal hak pilih. Langkah tersebut melibatkan unsur Bawaslu di daerah termasuk badan adhoc guna memastikan hak pilih setiap warga negara.

Ketua Bawaslu DIY Sutrisnowati, mengungkapkan lembaganya memiliki amanat untuk melaksanakan pengawasan di setiap tahapan pemilu. Saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah memasuki pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. "Hak pilih adalah elemen dasar dalam demokrasi. Bawaslu berkomitmen agar dalam pemilu serentak tahun 2024 seluruh warga negara yang memenuhi syarat un-

tuk memilih mendapatkan hak pilihnya," jelasnya di sela apel di halaman Kantor Bawaslu DIY, Senin (27/2). Menurutny, pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu tahapan yang paling krusial dalam pemilu. Hal ini karena membutuhkan akurasi sesuai kondisi yang sebenarnya. Tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dilakukan untuk memastikan hak

pilih warga negara telah benar-benar terjamin dengan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Oleh karena itu pihaknya akan terus melakukan upaya untuk melindungi hak pilih warga terutama yang tinggal di DIY. Melalui patroli pengawasan kawal hak pilih, jajarannya akan memastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kinerja KPU di seluruh tingkatan dan Pantarlih. "Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara, juga akan kami lakukan. Sasaran masyarakat difokuskan kepada masya-

rakat yang rentan dalam kerawanan hak pilih," imbuh Wati. Selain itu juga akan mendatangi secara langsung pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya. Di antaranya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, masyarakat yang tidak berdomisili sesuai dengan KTP serta masyarakat yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU. "Bentuk kegiatan dalam patroli tentunya disesuaikan dengan kearifan lokal dan peta kerawanan wilayah masing-masing. Kami juga mendirikan Posko Pengaduan Keliling Kawal Hak Pilih," ujarnya. (Dhi)-f

Wagub DIY Lantik 53 Pejabat Administrator dan Pengawas



KR-Riyana Ekawati

Perwakilan pejabat yang dilantik menandatangani Pakta Integritas disaksikan Wakil Gubernur DIY Paku Alam X.

YOGYA (KR) - Rotasi dan promosi jabatan hendaknya dipahami sebagai sebuah dinamika perkembangan organisasi. Dimana suatu proses harus diadakan secara terus menerus, karena adanya serangkaian perubahan dalam lingkungan organisasi untuk menjadi lebih baik. Semua itu dilakukan sebagai upaya untuk terus meningkatkan efektivitas organisasi dalam setiap situasi atau perubahan lingkungan yang terjadi. "Saya mengajak para pejabat yang baru saja dilantik untuk berkomitmen dan mempersembahkan diri dalam menjalankan tugas maupun tanggung jawab yang telah berkembang. Hal itu penting karena dalam situasi pemulihan pascapandemi Covid 19 tekad dan kerjasama yang baik dibutuhkan untuk mengatasi tantangan yang ada," kata Wakil Gubernur (Wagub) DIY Sri Paku Alam X dalam pelantikan 53 Pejabat Administrator dan Pengawas setingkat Eselon III dan IV Pemda DIY di Bangsal Kepatihan, Selasa (28/2). Menurut Wagub, pelantikan dan pengambilan sumpah diharapkan bisa menjadikan satu pemicu peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. Dengan begitu bisa seseorang untuk meningkatkan kompetensi guna memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Apabila hal itu dapat diwujudkan dengan baik diharapkan dapat menggerakkan roda pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah 53 Pejabat Administrator dan Pengawas disamping ditandai dengan pengucapan sumpah dan penandatanganan berita acara secara simbolis oleh 3 orang perwakilan pejabat yang dilantik. Selain itu mereka diminta menandatangani Pakta Integritas yang disaksikan Wakil Gubernur DIY Paku Alam X dan Pejabat yang hadir. (Ria)-f

Lomba Tiktok 70 Tahun Gandung Pardiman Hasilkan 28 Juta Viewer

YOGYA (KR) - Sebanyak 28 juta viewer dihasilkan oleh ratusan peserta lomba tiktok 70 tahun Gandung Pardiman yang telah digelar pekan lalu. Penggagas lomba Tiktok sekaligus yang punya hajat, yaitu Anggota DPR RI Gandung Pardiman menyampaikan ucapan terima kasih kepada

para peserta yang telah meluangkan waktu untuk berkreasi membuat konten di tiktok merayakan ultahnya ke 70 tahun. "Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua peserta. Lomba tiktok ini saya gelar sebagai ungkapan rasa cinta dan bangga saya kepada generasi muda yang selama ini berkreasi di Tiktok," ungkap Gandung Pardiman, Selasa (28/2). Seperti telah diberitakan sebelumnya, bahwa dalam rangka hari ulang tahun ke 70, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Gandung Pardiman pertengahan bulan Februari lalu hingga tanggal 25 Februari menggelar lomba Tiktok. Lomba Tiktok digelar



KR-Istimewa

Gandung Pardiman saat acara puncak ultahnya di Gunungkidul. pertengahan Februari hingga 25 Februari menyediakan hadiah uang tunai total Rp 10 juta untuk 11 pemenang. Pengumuman dan penyerahan pemenang (peraih viewer terbanyak) telah dilaksanakan pada puncak acara HUT 70 tahun Gandung Pardiman di Ponjong Gunungkidul, 25 Februari 2023. Gandung Pardiman yang juga Ketua DPD Partai Golkar DIY menegaskan bahwa lomba tiktok ini digelar sebagai wadah kompetisi kreativitas generasi muda milenial yang positif. Ke depan, disetiap kegiatan Partai Golkar DIY, Gandung Pardiman akan menggelar lomba-lomba kreasi serupa bagi anak muda. "Kami ingin menunjukkan bahwa Partai Golkar saat ini cocok dan bisa menjadi wadah bagi anak muda untuk berkreasi," tegas Gandung Pardiman. Karya dengan viewer terbanyak, berturut-turut yaitu, irhamkaruniawan (4,1 juta viewer), karistaputri (3,8 juta), enikastuty (3,4 juta), octa15 (3,2 juta), bagusekolegowo (2,1 juta), yongli11 (1,8 juta), fics.vu (1,6 juta), fxxnsa (1,5 juta), raffiym (1,4 juta), marya247681 (1,3 juta) dan ma_nita6 (1 juta viewer). (Dev)-f

YAYASAN

Bunga Selasih

PENGAJIAN SEKAR TELASIH

Hari : Ahad Kliwon
Tanggal : 05 Maret 2023
Jam : 09.00 - 11.00 WIB
Tempat : Kantor Yayasan Bunga Selasih
Penceramah : **Ust. Adi Abdillah**

Kantor:
Sendowo Blok B no. 42 B, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55284
Telp. (0274) 550-444 Faks. (0274) 540-555

MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN
DPRD KOTA YOGYAKARTA

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Targetkan 14 Produk Hukum, Kejar Pembahasan Awal Waktu

YOGYA (KR) - Sama seperti tahun 2022 lalu, pada tahun ini Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogyakarta menargetkan 14 produk hukum. Seluruhnya sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan telah mendapatkan pengesahan. Proses pembahasannya pun dikejar di awal waktu agar segera mendapatkan nomor registrasi serta dapat disosialisasikan ke masyarakat. Bapemperda menjadi salah satu alat kelengkapan dewan yang memiliki peran sentral. Hal ini berkaitan dengan salah satu penunjang ketugasan dewan dalam hal legislasi. Di Kota Yogyakarta, Bapemperda diisi oleh sepuluh wakil rakyat. Dua orang anggota merangkap sebagai pimpinan yakni Tri Waluko Widodo sebagai ketua dan Emanuel Ardi Prasetya selaku wakil ketua. Merujuk tata tertib DPRD, Bapemperda

memiliki tugas dan wewenang dalam mengorganisasikan pembentukan peraturan daerah mulai dari proses perencanaan, usulan hingga penetapan. Sedangkan dalam proses pembahasan di tiap rancangan peraturan daerah, Bapemperda dibantu oleh panitia khusus (pansus) yang dibentuk melalui sidang paripurna. Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta Tri Waluko Widodo, menjabarkan dari total 14 produk hukum yang ditargetkan pada tahun ini, tiga produk hukum di antaranya bersifat wajib. Hal ini karena berkaitan dengan anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan yakni APBD 2024, APBD Perubahan 2023 dan Pertanggung jawaban APBD 2022. Selain itu terdapat lima produk hukum yang diinisiasi oleh kalangan dewan, dan sisanya merupakan inisiatif eksekutif. "Tahun lalu ada empat produk hukum yang inisiatifnya dari dewan, se-



KR-Ardhi Wahdan

Tri Waluko Widodo dangkan tahun ini bertambah menjadi lima produk," tandasnya. Produk hukum yang diinisiasi oleh kalangan dewan ialah terkait perlindungan UKM dan koperasi, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, penyelenggaraan kesejahteraan warga lanjut usia, perubahan perda terkait penanggulangan bencana, dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Sedangkan produk hukum yang menjadi in-



KR-Ardhi Wahdan

Emanuel Ardi Prasetya isiatif eksekutif selain perda wajib ialah terkait pengarusutamaan gender, pencabutan perda terkait sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan, penambahan penyertaan modal PDAM dan Jogjatama Vishesha, pajak dan retribusi daerah, serta sistem penyelenggaraan pendidikan. Widodo mengaku, pihaknya sudah membagi skema pembahasan seluruh target produk hukum tersebut berdasarkan semester. Sebagian besar atau meliputi sembilan produk hukum waktu

pembahasannya dilakukan pada semester pertama. Sedangkan sisanya atau lima produk hukum pada semester kedua. Bahkan sejak awal tahun sudah ada dua produk hukum yang telah dibahas melalui tim pansus. "Pada bulan Maret ini akan ada lima produk hukum lagi yang akan dibahas. Keanggotaan pansus juga sudah kami siapkan agar bisa segera berjalan. Di luar target dalam Propemperda 2023 ini, kami juga siapkan produk hukum untuk pokok pikiran dewan. Ini juga akan kami bahas mulai Maret," urainya. Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta Emanuel Ardi Prasetya, menambahkan skema pembahasan Propemperda tahun ini juga tidak akan berbeda dengan tahun lalu. Setiap pansus berisi paling banyak 15 anggota dewan. Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta memberikan tenggat waktu paling lama tiga bulan bagi pansus

dalam merampungkan pembahasan. Sepanjang tahun lalu, kinerja pansus pun dinilainya sangat baik karena belum ada yang sampai melampaui tenggat waktu. "Tahapan di pansus memang cukup panjang mulai dari pendalaman materi bersama mitra kerja, mencari data pembandingan hingga rapat dengar pendapat umum dengan melibatkan masyarakat. Tetapi tiga bulan itu kami nilai cukup, dan ternyata mampu dijalankan dengan baik," urainya. Ardi mengaku, pihaknya juga telah mengevaluasi kinerja pansus sepanjang tahun 2022 lalu. Seluruhnya mampu menjalankan kinerja secara positif lantaran tidak ada produk hukum yang sampai molor atau tertunda. Oleh karena itu, dirinya pun berharap kinerja pansus pada tahun ini dalam membahas produk hukum bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan. Bukan tidak mungkin, jika semua produk hukum mam-

pu diselesaikan dengan baik maka target tahun depan bisa diperbanyak. Semakin banyak target produk hukum, imbuh Ardi, memiliki nilai positif dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Terutama untuk mengantisipasi adanya perubahan undang-undang yang mengharuskan penyesuaian aturan di bawahnya. Apalagi perintah perundang-undangan merupakan aspek utama yang harus diprioritaskan. Sehingga jika dalam waktu tahun berjalan ada perintah undang-undang, maka tinggal melakukan penyesuaian tanpa harus merubah Propemperda. "Tinggal mengedrop rancangan peraturan daerah yang belum mende-sak, dan mengganti yang prioritas atas perintah undang-undang. Tanpa harus merubah Propemperda. Makanya tahun depan kami upayakan Propemperda dinaikkan paling tidak menjadi 18 produk hukum," katanya. (Dhi)-f



KR-Ardhi Wahdan

Bapemperda menggelar rapat kerja dengan tim eksekutif.



KR-Ardhi Wahdan

Tim eksekutif dari Bagian Hukum Setda Kota Yoga rapat kerja dengan Bapemperda.



KR-Ardhi Wahdan

Ketua Bapemperda memimpin jalannya rapat.



KR-Ardhi Wahdan

Pansus Raperda Penyertaan Modal melakukan pembahasan produk hukum.